

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdulkadir, Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Dhaniswara, Harjono. 2007. *Hukum Penanaman Modal: Tinjauan Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

H.S, Salim dan Budi Sutrisno. 2009. *Hukum Investasi di Indonesia*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

H.S, Salim. 2007. *Hukum Pertambangan di Indonesia Edisi Revisi Cet. III*. PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta.

H.S, Salim. 2010. *Hukum Divestasi di Indonesia*. PT. Gelora Aksara Pratama: Jakarta.

Head, John W. 2002. *Pengantar Hukum Ekonomi*. Elips: Jakarta.

Harahap, M. Yahya. 2009. *Hukum Perseroan Terbatas*. Sinar Grafika: Jakarta.

Panjaitan, Hulman. 2003. *Hukum Penanaman Modal Asing*. Ind-Hill Co: Jakarta.

Rahmadi, Ida Bagus. 2005. *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*. Ghalia Indonesia :Bogor.

Rajagukguk, Erman. 2007. *Hukum Investasi di Indonesia: Anatomi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*. FH Universitas Al-Azhar Indonesia: Jakarta.

Saleng, Abrar. 2004. *Hukum Pertambangan*. UII Press: Jogjakarta.

Sembiring, Simon Felix. 2009. *Jalan Baru untuk Tambang: Mengalirkan Berkah bagi Anak Bangsa*. PT. Elex Media Computindo: Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. CV. Rajawali: Jakarta.

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press: Jakarta.

Soemitro dan Ronny Hanitjo. 1985. *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Sudrajat, Nandang. 2010. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia menurut Hukum*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 183/PMK.05/2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah.

C. Artikel, Jurnal, Makalah dan Penelitian Ilmiah:

Dila, *Suara Tambang*: **FGD Renegosiasi Kontrak Pemerintah Harus Proaktif Upayakan Renegosiasi**. Buletin ICW Edisi 3 Oktober 2011.

Erika. 2009. *Penyelesaian sengketa Penanaman Modal Asing di bidang pertambangan Minerba*. Tesis. Program Pasca Sarjana FHUI: Depok.

Karina, Jesi. Hubungan Asas Pacta Sunt Servanda Dengan Kewajiban Negoisasi Ulang Royalti Pada Kontrak Pertambangan (Studi Kasus: Kontrak Karya PT Freeport Indonesia Company). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Indonesia: Depok.

Khairandy, Ridwan. *Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*. Jurnal. Jurnal Hukum UII Edisi Khusus Nomor 18 Oktober 2011: Yogyakarta.

Marwan Batubara, *Renegosiasi Kontrak*, Kompas 15 November 2011.

Muktiono, Wahyu. 2012. *Pilihan Forum Dalam Kontrak Karya Pertambangan Dan Implikasinya Terhadap Upaya Penyelesaian Sengketa Di Bidang Penanaman Modal (Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Antara Pemerintah Indonesia Dengan Pt Newmont Nusa Tenggara)*. Skripsi. Universitas Diponegoro: Semarang.

Prasetyo, Erry Wahyu. 2010. *Sovereign Wealth Funds sebagai Pengelola Kelebihan Likuiditas di Negara-Negara Gulf Cooperation Council*. Jurnal. Fakultas Ekonomi Unair: Surabaya.

Redi, Ahmad. *Divestasi Saham Dibidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal Asing*. Disertasi FH UI 2013.

Sekretariat Negara. 2009. *Naskah Akademik Undang-Undang Mineral dan Batubara*.

Thamrin Sihite dan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral. 2013. *Bahan Presentasi: Isu yang harus diputuskan Terkait Renegosiasi Kontrak Karya dan PKP2B*.

Victor Imanuel Williamson Nalle, *Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba*. Jurnal. Jurnal Mahkamah Konstitusi edisi 9, 3 September 2013: Jakarta.

D. Internet:

www.anggaran.depkeu.go.id

Redi, Ahmad. *Secercah Cahaya Pengaturan Divestasi Saham*, <http://www.hukumpertambangan.com>.